



KONFLIK ISRAEL–PALESTINA DAN PROSPEK PERDAMAIANNYA

Simela Victor Muhamad*)

Abstrak

Aksi kekerasan kembali mewarnai konflik Israel–Palestina dalam waktu satu bulan belakangan ini. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kondisi yang memanas ini dipicu oleh kebijakan Israel yang membatasi aktivitas warga Palestina di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, kebijakan yang kemudian direspons dengan aksi perlawanan. Kekerasan yang terjadi menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional dan kekhawatiran akan masa depan perdamaian Israel–Palestina. Meskipun sejumlah isu sulit disepakati, masyarakat internasional tidak bisa membiarkan konflik tersebut berlarut-larut dan perlu terus mendorong solusi damai. Para pihak yang bertikai, terutama pihak Israel, harus bersungguh-sungguh menjalani upaya dan proses perdamaian tersebut.

Pendahuluan

Konflik Israel–Palestina yang kembali meningkat belakangan ini telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional. Pasalnya, lebih dari 50 warga Palestina, di antaranya anak-anak, telah tewas sejak awal Oktober ini sebagai akibat dari aksi kekerasan yang terjadi antara tentara Israel dan warga Palestina. Lebih dari 1.900 orang Palestina cedera, banyak di antaranya luka parah, akibat penggunaan amunisi aktif oleh tentara Israel terhadap penduduk sipil Palestina yang tidak bersenjata dan tidak bisa mempertahankan diri. Di pihak Israel, setidaknya 10 warga Israel tewas akibat serangan yang dilakukan oleh warga Palestina. Sebagian besar adalah korban penikaman. Situasi yang

tidak kondusif ini segera saja menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional akan prospek perdamaian Israel–Palestina. Kajian singkat ini mencoba membahas pemicu konflik Israel–Palestina belakangan ini dan prospek perdamaian diantara mereka.

Pemicu Konflik

Konflik Israel–Palestina belakangan ini dipicu oleh kemarahan warga Palestina terhadap pelanggaran batas yang dilakukan oleh warga Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya, petugas keamanan Israel menerapkan aturan ketat yang membatasi warga Palestina memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa, yang berada di daerah pendudukan Israel di Jerusalem Timur. Pembatasan itu

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional, pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: victorsimela@yahoo.co.id



antara lain hanya orang-orang Palestina berusia 45 tahun ke atas yang diizinkan menunaikan shalat Jumat di masjid dan memasuki kompleks Al-Aqsa. Israel meningkatkan penjagaan dan memasang alat deteksi logam di beberapa pintu masuk Kota Lama Jerusalem (*The Old City of Jerusalem*). Ribuan polisi juga dikerahkan di sudut-sudut kota guna mencegah terjadinya aksi serangan dari kaum muda Palestina terhadap warga Israel di wilayah pendudukan.

Bagi Palestina, tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan. Palestina tidak bisa membiarkan wilayah pendudukan tersebut dikuasai secara mutlak oleh Israel dengan berbagai alasan. Pembagian Masjid Al-Aqsa dan Yahudisasi di kawasan ini akan selalu ditentang tegas oleh Palestina. Sebagaimana diketahui, Palestina telah menetapkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya jika kemerdekaan kelak secara penuh telah dicapai. Sebaliknya bagi Israel, yang menguasai Jerusalem sejak memenangi Perang Enam Hari pada 1967, Jerusalem adalah kota bersejarah dan ibu kota yang tidak bisa dibagi-bagi. Dalam pandangan Palestina, aksi perlawanan yang mereka lakukan merupakan bagian dari perjuangan untuk membebaskan tanah-tanah Palestina dari pendudukan Zionis Israel. Sebaliknya, aksi perlawanan warga Palestina tersebut selalu dibaca oleh Israel sebagai serangan yang membahayakan, dan karenanya perlu disikapi secara serius.

Sebagian pengamat menilai, aksi

kekerasan juga dipicu oleh kebijakan Israel yang terus membangun permukiman Yahudi di wilayah Palestina (di Tepi Barat dan Jerusalem Timur). Tindakan Israel menghancurkan rumah dan mengusir warga Palestina dari permukimannya, yang makin intens dilakukan Israel belakangan ini, juga semakin menyulut ketegangan dan memicu aksi kekerasan. Penguasaan Israel atas wilayah Palestina memang makin bertambah dari waktu ke waktu, setidaknya hal itu terlihat dari peta wilayah Palestina yang semakin menyusut (lihat Peta Palestina di bawah). Situasi semakin rumit, ketika elit politik Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif terhadap para pejuang Palestina. Terhadap kelompok Hamas misalnya, tindakan tersebut kemudian memancing ketegangan dan direspons warga Palestina, terutama yang berada di Jalur Gaza dan merasa telah ditindas oleh Israel, dengan aksi perlawanan.

Masyarakat internasional pun segera merespons dengan keprihatinan aksi kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina tersebut, karena khawatir akan semakin menjauhkan harapan bagi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, meminta Israel dan Palestina untuk bisa menahan diri dan segera mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan. Hal tersebut juga diungkapkan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, melalui pembicaraan langsungnya dengan pemimpin Israel dan Palestina.

Gambar 1 Peta Kehilangan Wilayah Palestina Sejak 1947



Sumber: Occupied Palestine, 20 Juni 2013, <https://occupiedpalestine.wordpress.com> – diakses 23 Oktober 2015

Sementara negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bersidang menyikapi aksi kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina yang dipandang sudah sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup warga Palestina yang bermukim di wilayah pendudukan Israel.

Prospek Perdamaian

Aksi kekerasan terbaru dan reaksi dengan kekerasan lainnya, ditambah terus dilanjutkannya pembangunan permukiman Yahudi, membuat peluang solusi damai dua negara semakin sulit terwujud. Seruan PBB kepada kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan, menghindari aksi kekerasan serta tidak melakukan provokasi, ditanggapi oleh banyak pihak sebagai imbauan yang bijak tetapi amat sulit diwujudkan. Sejumlah media bahkan menulis, aksi kekerasan terbaru itu, sebagai manifestasi keputusan dan rasa frustrasi warga Palestina menyikapi situasi yang ada.

Proses perundingan perdamaian memang semakin tidak jelas. Sekurangnya masih ada empat isu utama yang belum bisa dipecahkan dan disepakati kedua belah pihak. *Pertama*, soal pengungsi. Konflik Israel – Palestina telah menyebabkan sebagian warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga terdekat (seperti ke Mesir, Suriah dan Yordania). Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) mencatat setidaknya ada 5,2 juta pengungsi Palestina yang terdaftar dan telah mendapatkan bantuan PBB. Bagi otoritas Palestina, warga Palestina yang menjadi pengungsi di sejumlah negara tersebut memiliki hak untuk kembali ke tempat permukiman asal mereka (di wilayah pendudukan Israel).

Kedua, soal Jerusalem. Bagi otoritas Palestina, keberadaan kota Jerusalem, khususnya Jerusalem Timur (yang dalam Perang Enam Hari 1967 direbut Israel) juga harus menjadi bagian dari kesepakatan damai dengan Israel karena telah ditetapkan sebagai ibu kota negara masa depan Palestina. Isu Jerusalem menjadi salah satu isu tersulit karena rezim zionis Israel sampai sejauh ini mengambil posisi untuk tidak membagi kota bersejarah tersebut dengan

Palestina.

Ketiga, soal perbatasan. Perbatasan Israel – Palestina juga menjadi isu krusial yang harus dibicarakan oleh kedua belah pihak. Memerhatikan peta wilayah Palestina di atas, tampak jelas bahwa wilayah Palestina semakin menyusut akibat perluasan wilayah pendudukan Israel. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kemudian Palestina menuntut soal perbatasan juga harus dikaitkan dengan wilayah kedaulatan Palestina sebelum pendudukan Israel, setidaknya sebelum Perang 1967. *Keempat*, soal keamanan. Keamanan juga harus menjadi bagian penting yang dibicarakan oleh kedua belah pihak agar kelangsungan hidup masyarakat terjamin; karena ada kekhawatiran di masing-masing pihak bahwa kelompok radikal akan mengganggu keamanan manakala perdamaian tercapai.

Selama keempat isu tersebut belum disepakati, kemungkinan kecil bisa tercapai perdamaian antara Israel dan Palestina. Proses perdamaian Israel dan Palestina yang terhenti selama hampir satu dekade, tampaknya belum memiliki prospek positif seiring pengibaran bendera Palestina di PBB. Ketika berpidato di Majelis Umum PBB, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyatakan kalau Israel terus melakukan pelanggaran, Palestina tidak lagi terikat dengan Perjanjian Oslo tahun 1993, yang dibuat sebagai persyaratan inti dalam proses perdamaian. Meskipun bernada dramatis, pidato itu secara efektif menjadi kebijakan Palestina sejak 2011 ketika Abbas mengajukan banding yang pertama ke PBB untuk mengubah status Palestina di luar kerangka bilateral Perjanjian Oslo.

Kebijakan Abbas sejak saat itu telah membuat Palestina mendapatkan serangkaian kemenangan simbolis. Pada bulan November 2012, Majelis Umum PBB memberikan Palestina status sebagai anggota pengamat non-anggota, langkah yang ditentang keras oleh Israel dan Amerika Serikat. Pada pertengahan September 2015, pemungutan suara di Majelis Umum PBB memutuskan agar bendera Palestina dikibarkan di markas besar PBB walaupun statusnya masih pengamat.

Usai pengibaran bendera Palestina di markas besar PBB di New York, serta pidato Presiden Palestina Mahmoud

Abbas di depan Majelis Umum PBB, masih belum jelas bagaimana Abbas seorang diri bisa mengubah permainan untuk menuju perdamaian Israel–Palestina. Di tengah-tengah eskalasi kekerasan Israel dan Palestina yang belum menunjukkan tanda-tanda akan menurun, pembicaraan perdamaian Israel–Palestina tidak mudah diwujudkan. Meskipun demikian, pembicaraan untuk menghentikan hal tersebut terus dilakukan oleh sejumlah pihak.

Penutup

Aksi kekerasan antara tentara Israel dan warga Palestina bukan sekali ini saja terjadi, tetapi sudah sering terjadi, bahkan sudah seperti pemandangan biasa bagi warga Palestina yang bermukim di Jalur Gaza yang hingga kini masih dikontrol Israel. Perundingan perdamaian Israel – Palestina pun telah dilakukan berkali-kali. Namun demikian, lagi-lagi upaya tersebut selalu mengalami kegagalan di tengah jalan sehingga tidak mengherankan jika kemudian timbul pesimisme terhadap perundingan perdamaian Israel – Palestina.

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh penulis pada kajian singkat terdahulu (Vol. 5, No. 15/Agustus/2013), upaya menghidupkan kembali perundingan perdamaian hanya bisa dilakukan, jika Israel memperlihatkan keinginan sungguh-sungguh untuk mencari solusi damai, terutama terhadap empat isu utama sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dalam kerangka itu, para pihak yang berkonflik, terutama Israel harus menghormati dan mematuhi berbagai Resolusi DK PBB yang berkaitan dengan konflik, diantaranya Resolusi 242 tahun 1967 dan Resolusi 338 tahun 1973. Resolusi 242 adalah resolusi yang menuntut Israel untuk segera menarik mundur pasukannya dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam Perang Enam Hari tahun 1967, dan Resolusi 338 yang menegaskan kepada para pihak yang bersengketa untuk menghentikan perang dan mematuhi Resolusi 242.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia harus terus mendorong proses perdamaian tersebut, baik melalui jalur diplomasi pemerintah (seperti yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidatonya

di Majelis Umum PBB September 2015) maupun melalui diplomasi parlemen di forum-forum antarparlemen. Melalui jalur diplomasi parlemen, DPR RI perlu terus membangun komitmen bersama dengan parlemen negara-negara sahabat untuk terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dan pentingnya solusi damai konflik Israel–Palestina. *Asian Parliamentary Assembly* (APA), *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF), *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC/PUOICM), dan *Inter-Parliamentary Union* (IPU) adalah beberapa contoh forum antarparlemen yang harus terus dimanfaatkan oleh DPR RI untuk membangun komitmen dan optimisme internasional akan pentingnya perdamaian Israel–Palestina diwujudkan.

Referensi

- Martin Bunton, *The Palestinian-Israeli Conflict: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2013.
- Simela Victor Muhamad, “Perundingan Perdamaian Palestina-Israel”, *Info Singkat*, Vol. V, No.15/I/P3DI/Agustus/2013.
- “Mencegah Intifadah Ketiga Terjadi”, *Tajuk Rencana Kompas*, 17 Oktober 2015, hal. 6.
- “Barack Obama calls on Israeli and Palestinian leaders to calm mounting violence”, *theguardian.com.*, 17 Oktober 2015, <http://www.theguardian.com/world/2015/oct/17/barack-obama-calls-on-leaders-to-calm-rhetoric-as-israel-violence-mounts> – diakses 19 Oktober 2015.
- “4 Palestinians killed by Israeli fire in unrest”, *The Jakarta Post*, 20 Oktober 2015, hal. 12.
- “Teenager becomes a focus in Israel-Palestinian conflict”, *The Jakarta Post*, 21 Oktober 2015, hal. 10.
- “Ban Kii-moon urges Palestinians, Israelis to seek peace”, *The Jakarta Post*, 22 Oktober 2015, hal. 12.
- “Serukan Perdamaian demi Masa Depan”, *Media Indonesia*, 22 Oktober 2015, hal. 9.
- “Israel lifts Muslim age limit at Jerusalem shrine”, *The Jakarta Post*, 24 Oktober 2015, hal. 11.